Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI DESA BANYU TAJUN HILIR KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hidayati [1], Saidah Hasbiyah [2], Hasbi Salim [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: hyatii167@gmail.com

ABSTRAK

Studi kualitatif dengan tipe deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) beserta faktor-faktor penentunya di Desa Banyu Tajun Hilir, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian dilatarbelakangi oleh isu krusial seperti minimnya sosialisasi publik, belum terbentuknya Posyandu Remaja, serta partisipasi kelompok lansia yang masih terbilang rendah. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam terhadap 14 orang informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana uji kredibilitas diterapkan via triangulasi data. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi ILP belum berjalan optimal akibat sosialisasi yang kurang intensif, keterbatasan kuantitas dan kapasitas kader, minimnya alokasi anggaran dan peralatan medis, serta belum terwujudnya fungsi kunjungan rumah dan skrining kesehatan sesuai standar operasional prosedur. Kendati komitmen petugas dan keandalan jadwal bulanan menjadi daya dukung pendorong, efektivitas capaian program tetap terhambat oleh pasifnya keterlibatan warga serta keterbatasan kegiatan pelatihan kader. Oleh sebab itu, solusi strategis memerlukan sinergi lintas sektor melalui peningkatan pendampingan Puskesmas, pemenuhan alokasi fasilitas dan dana desa, pembinaan keterampilan kader secara berkesinambungan, serta optimalisasi partisipasi masyarakat luas guna mendorong efektivitas dan pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Program, Posyandu ILP, Layanan Kesehatan Desa.

ABSTRACT

This descriptive qualitative study aims to comprehensively analyze and describe the implementation of the Integrated Primary Service Post (ILP) Program and its determining factors in Banyu Tajun Hilir Village, Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency. The research was motivated by crucial issues such as the lack of public outreach, the lack of a Youth Posyandu, and the relatively low participation of the elderly. Primary and secondary data were collected through field observations, documentation studies, and in-depth interviews with 14 key informants selected using purposive sampling techniques, with credibility testing applied via data triangulation. The results of the study indicate that the implementation of ILP has not been optimal due to insufficient outreach, limitations in the number and capacity of cadres, minimal budget allocation and medical equipment, and the failure to implement home visits and health screenings in accordance with standard operating procedures. Although officer commitment and a reliable monthly schedule are driving factors, the effectiveness of the program's achievements remains hampered by passive

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

community involvement and limited cadre training activities. Therefore, strategic solutions require cross-sector synergy through increased support for Community Health Centers (Puskesmas), allocation of village facilities and funds, ongoing skills development for cadres, and optimization of broader community participation to promote effective and equitable access to village health services.

Keywords: *Program Implementation, Integrated Health Posts (Posyandu ILP), Village Health Services.*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan pada hakikatnya merupakan pilar utama dalam pemenuhan hak dasar manusia yang memengaruhi produktivitas serta taraf kesejahteraan hidup secara universal. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), setiap individu berhak atas kehidupan sejahtera lahir dan batin, lingkungan hidup yang baik, serta layanan kesehatan. Sejalan dengan itu, regulasi formal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memformulasikan bahwa kesehatan merupakan keadaan sejahtera paripurna mencakup dimensi fisik, mental, spiritual, dan sosial agar manusia hidup produktif. Pengoptimalan derajat kesehatan warga ini menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional yang berkorelasi langsung dengan kualitas Sumber Daya Manusia. Di tingkat akar rumput, Posyandu hadir di bawah naungan Puskesmas sebagai wadah terpadu untuk memberdayakan warga sekaligus memberikan kemudahan akses bagi kesehatan ibu dan anak melalui peran aktif kader kesehatan sebagai ujung tombak pelaksana program.

Transformasi ini melahirkan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai transisi dari model konvensional yang menyatukan seluruh jenis pelayanan dalam satu waktu dan tempat. Namun, catatan empiris sejak Juni 2025 di Desa Banyu Tajun Hilir menunjukkan adanya kesenjangan operasional yang cukup nyata. Pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa rendahnya kehadiran masyarakat lanjut usia akibat keterbatasan fisik, kurangnya dukungan keluarga, serta rendahnya kesadaran personal untuk memeriksakan diri secara rutin. Di sisi lain, Posyandu bagi kelompok remaja justru belum bisa dilaksanakan sama sekali karena partisipasi generasi muda yang rendah, belum adanya ketetapan jadwal khusus, serta keterbatasan pengetahuan kader mengenai kesehatan remaja. Permasalahan ini diperparah oleh terbatasnya sosialisasi menyeluruh kepada warga desa, sehingga pemanfaatan Posyandu ILP belum mampu menjangkau seluruh target siklus hidup masyarakat secara optimal.

Mengurai persoalan struktural tersebut memerlukan tinjauan teoretis mengenai esensi kebijakan publik sebagai instrumen intervensi pemerintah. Menurut Abdul Wahab (2005) dalam Ida Syafriyani (2023:1), kebijakan dipandang sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada pemecahan serangkaian masalah kemasyarakatan yang saling berkaitan. Komponen publik sendiri merujuk pada sekelompok masyarakat yang berhubungan dengan suatu komunitas atau negara, sebagaimana dipaparkan Frank Jefkins (1995:71) dalam Ida Syafriyani (2023:1). Selanjutnya, Thomas Dye (1981) dalam Ida Syafriyani (2023:2) menegaskan bahwa kebijakan publik adalah segala pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, di mana pilihan pasif maupun aktif tersebut membawa dampak yang sama besarnya bagi warga. Perspektif ini diperkuat oleh Anggara dalam Dian Suluh Kusuma Dewi (2014) yang memaknai kebijakan sebagai rangkaian keputusan saling berhubungan dari pejabat otoritas formal guna melegitimasi arah tindakan yang mengikat orang banyak.

Setelah regulasi politik disahkan, tahapan krusial berikutnya adalah mengoperasionalkan gagasan tersebut melalui implementasi nyata. Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan praktis dari rencana yang telah disusun secara matang. Makna ini sejalan dengan kamus Webster yang mendefinisikannya sebagai penyediaan sarana pendukung guna memberikan dampak konkret terhadap sesuatu. Dalam kajian administrasi, James E. Anderson dalam Islamy (2009:17) sebagaimana dikutip Anirwan (2025:27)

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

menjelaskan kebijakan sebagai rangkaian tindakan bertujuan dari para aktor untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Regulasi tertulis tidak akan bermakna tanpa adanya tindakan nyata di lapangan. Oleh sebab itu, Winarno (2005:101) dalam Anirwan (2025:41) mengemukakan bahwa implementasi merupakan alat administrasi hukum tempat bertemunya berbagai aktor, organisasi, prosedur baku, serta teknik manajerial yang bekerja bersama-sama demi merealisasikan tujuan strategis yang dikehendaki.

Guna membedah keberhasilan program kesehatan desa, kerangka teoretis George Edwards III dalam Leo Agustino (2022:154-158) menyediakan empat variabel analisis utama. Variabel pertama adalah komunikasi yang memegang indikator transmisi informasi agar bebas distorsi birokrasi, kejelasan instruksi bagi pelaksana tingkat bawah agar tidak membingungkan, serta konsistensi perintah agar tidak menimbulkan dualisme standar di lapangan. Variabel kedua adalah ketersediaan sumber daya sebagai faktor penentu efektivitas operasional. Edwards III membaginya ke dalam elemen staf atau sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas dan kapabilitas keahlian, ketersediaan informasi teknis mengenai cara kerja serta kepatuhan regulasi, legitimasi wewenang formal agar tindakan implementor diakui publik, hingga pemenuhan fasilitas sarana prasarana fisik yang memadai sebagai instrumen penunjang kerja harian di lapangan agar program tidak sekadar menjadi dokumen di atas kertas.

Variabel ketiga dalam pendekatan Edwards III yang diuraikan oleh Leo Agustino (2022:154-158) berkaitan dengan disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan. Efek disposisi ini sangat krusial; jika personil lapangan tidak memiliki dedikasi penuh terhadap kepentingan publik, maka akan muncul hambatan nyata dan bias pelayanan. Langkah antisipasinya mencakup penataan birokrasi melalui sistem pengangkatan staf yang sesuai dengan kompetensi, serta pemanfaatan insentif untuk memanipulasi kecenderungan pribadi pelaksana agar searah dengan tujuan organisasi. Variabel keempat adalah struktur birokrasi yang menuntut koordinasi yang kuat demi mendukung keputusan politik. Struktur ini digerakkan melalui Standard Operating Procedures (SOP) sebagai aktivitas terencana rutin untuk memenuhi standar pelayanan minimum warga sehari-hari. Selain itu, aspek fragmentasi dijalankan untuk menyebar tanggung jawab program kepada beberapa unit kerja yang kompeten agar eksekusi di lapangan menjadi lebih efektif.

Sebagai perspektif komplementer, Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2022:150-153) merumuskan enam variabel penentu kinerja implementasi kebijakan publik. Pertama adalah ukuran dan tujuan kebijakan yang harus bersifat realistis dan adaptif dengan sosio-kultural warga setempat agar tidak menjadi utopis. Kedua adalah kecukupan sumber daya yang mencakup kecakapan manusia, kucuran dana finansial, serta manajemen waktu yang tepat. Ketiga adalah karakteristik agen pelaksana yang melibatkan kesesuaian sifat organisasi formal maupun informal dengan wilayah intervensi. Keempat berkaitan dengan disposisi atau sikap penerimaan agen pelaksana terhadap kebijakan top-down. Kelima adalah komunikasi antar-organisasi dan koordinasi aktivitas sebagai syarat mutlak meminimalkan kesalahan teknis. Terakhir adalah lingkungan ekonomi, sosial, dan politik eksternal yang harus kondusif demi mendorong keberhasilan serta keberlanjutan program publik yang dijalankan di tingkat daerah.

Ketika kerangka teori ini diintegrasikan ke lapangan, operasional Posyandu ILP wajib bersandar pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2015 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Prosedur pelayanan harus berjalan terstruktur, mulai dari pendaftaran identitas, penimbangan, pengukuran fisik menggunakan dokumen KMS, hingga pencatatan medis untuk divalidasi sekretaris menjadi laporan resmi Puskesmas. Penerapan sistem terpadu ini membawa lima manfaat utama, yaitu mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat terpencil, memperluas cakupan perlindungan primer, memperkuat pemantauan wilayah setempat secara berkelanjutan, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta memberdayakan warga melalui edukasi mandiri. Melalui penguatan kapasitas kader, dukungan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

anggaran desa, dan peningkatan sarana alat kesehatan, implementasi Posyandu ILP diharapkan mampu berjalan optimal demi mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

METODE

Pelaksanaan aktivitas ilmiah ini mengambil setting empiris di Kantor Desa Banyu Tajun Hilir, sebuah instansi pelayanan publik yang berkedudukan di Jalan Alabio Babirik RT 03, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penentuan titik lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis, spasial, dan administratif guna mengamati secara langsung bagaimana dinamika birokrasi tingkat desa berjalan dalam mengeksekusi program kesehatan. Melalui pemilihan lokasi yang spesifik ini, peneliti dapat berinteraksi secara intensif dengan para aktor lokal, perangkat desa, serta masyarakat setempat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam objek yang sedang dikaji. Konteks ruang ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menangkap realitas kultural dan struktural yang melingkupi lokus penelitian tersebut secara objektif dan natural.

Dalam usaha membedah fenomena yang diteliti, studi ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada eksplorasi naturalistik di lapangan. Penggunaan paradigma kualitatif ini bermaksud untuk mengobservasi, menghimpun, serta menguraikan data secara komprehensif guna menyingkap tabir realitas sosial yang berkembang di tengah-tengah komunitas masyarakat setempat. Menurut pandangan Sugiyono (2022:8-9), metode kualitatif difungsikan untuk menjaring data secara mendalam demi menemukan substansi makna yang hakiki. Esensi makna di sini merujuk pada kebenaran empiris yang absolut dan bersifat definitif, yang kerap kali tersembunyi di balik data superfisial yang tampak di permukaan. Oleh sebab itu, orientasi utama dari penelitian kualitatif ini tidak diarahkan pada generalisasi populasi secara statistik, melainkan lebih menitikberatkan pada kedalaman pemahaman eksplanatif terhadap makna substantif dari fenomena yang dikaji.

Selaras dengan karakteristik masalahnya, jenis rancangan yang diaplikasikan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Melalui tipe penelitian ini, peneliti berkomitmen untuk menyajikan deskripsi yang sangat cermat, sistematis, serta holistik mengenai "Implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Di Desa Banyu Tajun Hilir Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara". Pilihan metode deskriptif ini dirancang agar penyajian data tidak sekadar berakhir menjadi sebuah ikhtisar atau rangkuman yang kaku, melainkan bertindak sebagai instrumen analitis yang mampu mempermudah peneliti dalam menguraikan kompleksitas peristiwa di lapangan. Dengan demikian, pendekatan deskriptif ini berfungsi efektif untuk melakukan klarifikasi, pemetaan, serta rekonstruksi kronologis terhadap setiap momentum dan kebijakan yang terjadi sepanjang proses penelitian berlangsung.

Konstruksi argumentasi dalam penelitian ini ditopang oleh dua kategori data, yakni data primer dan data sekunder, yang dijaring memanfaatkan teknik purposive sampling. Data primer bertindak sebagai basis informasi utama yang diperoleh secara empiris dari sumber orisinal di lapangan melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam bersama para informan kunci, yakni anggota kelompok metode penelitian kualitatif yang berdomisili di Desa Banyu Tajun Hilir, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keunggulan dari data primer ini terletak pada kemampuannya merefleksikan otentisitas fakta berdasarkan apa yang diindera secara langsung oleh peneliti, sehingga meminimalisasi potensi distorsi atau informasi bias dari subjek penelitian. Di sisi lain, data sekunder dikumpulkan dari literatur pendukung yang telah mapan seperti publikasi ilmiah terdahulu, buku teks, dokumen resmi, regulasi, media cetak, serta warta digital yang relevan dengan performa birokrasi dalam mengeksekusi kebijakan tersebut. Seluruh informan dan sumber data tersebut dipilih secara sengaja (purposive) berdasarkan kriteria keahlian dan keterlibatan langsung, di mana fokus utamanya diletakkan pada pemenuhan variasi informasi yang tuntas dan mendalam, bukan pada kuantitas kuantitatif jumlah sampel.

Desain operasional dalam penelitian ini diposisikan sebagai kerangka kerja konseptual sekaligus panduan praktis untuk memetakan alur penelusuran informasi terkait variabel atau fokus

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

masalah yang tengah diteliti. Pada paradigma kualitatif, eksistensi peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang memegang kendali penuh atas dinamika pencarian data di lapangan. Guna menunjang efektivitas instrumen hidup tersebut, peneliti mempergunakan instrumen bantu operasional seperti pedoman observasi terstruktur, panduan wawancara mendalam, serta lembar dokumentasi penunjang. Seluruh perangkat pengumpulan data ini dioptimalisasi untuk merekam, memotret, serta memformulasikan dinamika riil di lapangan, di mana output visual dan tekstual yang diperoleh nantinya akan diolah secara analitis demi menghasilkan konseptualisasi yang utuh mengenai Implementasi Pelayanan Publik Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Di Desa Banyu Tajun Hilir Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Proses pengumpulan data merupakan fase yang sangat krusial dalam metodologi penelitian karena menjadi pintu masuk utama bagi perolehan data empiris yang valid. Menukil pemikiran Sugiyono (2022:222), teknik pengumpulan data menempati posisi paling strategis dalam operasionalisasi penelitian karena tanpa penguasaan teknik yang memadai, peneliti mustahil memperoleh data yang sesuai dengan standardisasi yang telah ditetapkan. Kajian ini mengombinasikan tiga teknik utama, pertama adalah observasi di mana Nasution (dalam Sugiyono, 2022:224) menegaskan bahwa pengamatan langsung merupakan fondasi fundamental dari seluruh struktur ilmu pengetahuan yang memungkinkan peneliti menangkap fakta riil dunia nyata. Teknik kedua ialah wawancara mendalam yang selaras dengan pandangan Esterberg (dalam Sugiyono, 2022:231) didefinisikan sebagai interaksi dialektis antara dua individu untuk saling bertukar gagasan dan informasi melalui tanya jawab guna mengonstruksikan makna dari suatu topik. Terakhir, teknik dokumentasi diterapkan berdasarkan konsep Sugiyono (2022:240) sebagai metode perekaman terhadap rekam jejak peristiwa masa lalu, baik berupa berkas tertulis, arsip kebijakan, foto kegiatan, maupun dokumen institusional formal lainnya.

Metode analisis data yang diterapkan mengadopsi corak deskriptif kualitatif, di mana akumulasi data di lapangan diinterpretasikan secara kritis lalu disajikan melalui narasi logis berbasis kerangka teoritis yang relevan guna menjawab seluruh rumusan masalah. Mengacu pada kerangka metodologis Sugiyono (2022:246), aktivitas analisis kualitatif ini dilakukan secara interaktif semenjak proses pengumpulan data berlangsung hingga pasca-lapangan melalui tiga tahapan simultan. Tahap awal adalah kondensasi data yang merujuk pada formulasi Sugiyono (2022:370) sebagai aktivitas merangkum, menyeleksi aspek fundamental, melakukan pengkodean (coding), serta mengklasifikasikan data mentah lapangan agar terbebas dari bias eksternal. Langkah berikutnya adalah penyajian data (data display) yang menurut Sugiyono (2022:373) bertujuan menyusun matriks informasi secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman komprehensif dan menentukan langkah strategis berikutnya. Proses ini diakhiri dengan penarikan serta verifikasi kesimpulan yang didasarkan pada argumen Sugiyono (2022:374) sebagai fase peninjauan kembali catatan lapangan secara kritis guna menguji akurasi, kecocokan, serta validitas temuan akhir.

Untuk menjamin derajat keabsahan dan kepercayaan terhadap temuan ilmiah ini, dilakukan uji kredibilitas data yang bertindak sebagai pemenuhan aspek validitas internal dalam riset kualitatif. Berpedoman pada tesis Sugiyono (2022:365), pengujian tingkat kepercayaan hasil penelitian ini ditempuh melalui enam strategi terintegrasi yang saling menguatkan. Langkah pertama melibatkan perpanjangan pengamatan di lokus penelitian untuk mempererat hubungan emosional dan keterbukaan informasi dengan narasumber agar tidak ada fakta yang tertutupi. Strategi kedua dijalankan dengan meningkatkan ketekunan melalui pengamatan yang lebih teliti, cermat, dan berkesinambungan guna mendeteksi variasi distorsi informasi sejak dini. Langkah ketiga adalah triangulasi baik triangulasi sumber, teknik, maupun waktu yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran informasi lintas sektoral. Keempat, peneliti memanfaatkan bahan referensi pendukung seperti rekaman digital dan dokumentasi fotografis untuk memperkokoh otentisitas data. Kelima, dilakukan analisis kasus negatif dengan menelusuri data yang anomali atau bertentangan guna memperluas perspektif analitis. Terakhir, langkah membercheck diimplementasikan sebagai

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mekanisme konfirmasi ulang kepada informan asal demi menyelaraskan interpretasi peneliti dengan makna asli yang dimaksudkan oleh informan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Di Desa Banyu Tajun Hilir Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Komunikasi

a. Transmisi

Alur diseminasi informasi yang dirancang secara matang menjadi pilar utama dalam menjamin keberhasilan eksekusi suatu program di lapangan. Namun, realitas birokrasi yang bertingkat kerap kali memicu distorsi pesan atau salah tafsir sebelum gagasan tersebut menyentuh tingkat akar rumput. Berdasarkan perspektif teoretis George C. Edward III (1980:10), dimensi transmisi atau penyaluran pesan yang konsisten dan presisi sangat krusial dalam menyokong keberhasilan implementasi kebijakan publik, sebab kejelasan instruksi memudahkan pemahaman para aktor pelaksana maupun masyarakat sasaran. Jika jalur penyampaian ini terhambat oleh sekat-sekat birokratis, maka esensi dan tujuan utama dari kebijakan tersebut dipastikan tidak akan tersampaikan secara utuh. Temuan empiris di Desa Banyu Tajun Hilir menunjukkan bahwa aspek sosialisasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) belum berjalan optimal, sehingga kontradiktif dengan prinsip dasar teori Edward III tersebut. Meskipun kader telah mendayagunakan media digital seperti WhatsApp, pengeras suara, hingga kunjungan langsung, penyebaran informasi mengenai manfaat ILP belum merata. Dampaknya, partisipasi warga khususnya kelompok lanjut usia (lansia) masih sangat minim karena terkendala keterbatasan mobilitas fisik, nihilnya pendampingan keluarga, serta rendahnya kesadaran preventif untuk memeriksakan kesehatan secara berkala. Kesenjangan komunikasi ini pada akhirnya melemahkan partisipasi publik dan menghambat efektivitas pelayanan kesehatan primer di desa tersebut.

b. Kejelasan

Diseminasi instruksi dalam eksekusi kebijakan dituntut memiliki tingkat transparansi yang tinggi tanpa menyisakan ruang bagi ambiguitas yang mendua. Menurut postulat George C. Edward III (1980:12), aspek kejelasan (clarity) dalam saluran komunikasi memegang peranan krusial agar arah dan esensi program dapat diinternalisasi secara seragam oleh aparatur pelaksana maupun masyarakat luas. Kendati fleksibilitas adakalanya dibutuhkan pada tataran teknis, ketidakjelasan pesan justru rentan mendistorsi target awal kebijakan. Realitas empiris di Desa Banyu Tajun Hilir menunjukkan bahwa dimensi kejelasan ini belum beroperasi secara optimal pada Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Walau alur serta jadwal bagi balita dan ibu hamil sudah dipahami, kepastian waktu bagi kelompok remaja masih kabur, diperparah oleh minimnya pemahaman kaum lansia mengenai faedah jangka panjang layanan ini. Kesenjangan edukasi tersebut pada akhirnya memicu rendahnya partisipasi warga, sebuah anomali yang bertolak belakang dengan teori Edward III mengenai urgensi komunikasi yang bebas dari kebingungan.

c. Konsistensi

Stabilitas dan keselarasan instruksi yang diberikan oleh pembuat kebijakan merupakan prasyarat mutlak guna menjamin kelancaran operasional di lapangan. Merujuk pada postulat teoretis George C. Edward III (1980:13), dimensi konsistensi (consistency) dalam penyampaian informasi dan perintah wajib dijaga agar tidak memicu ambiguitas atau disintegrasi fokus di kalangan agen pelaksana. Jika regulasi teknis kerap berubah secara mendadak, implikasinya akan melahirkan keraguan bagi eksekutor kebijakan.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Kondisi ideal inilah yang berhasil diwujudkan dalam implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Banyu Tajun Hilir, di mana aspek konsistensi dilaporkan telah berjalan sangat optimal. Data empiris menunjukkan bahwa penentuan jadwal, lokasi, alokasi waktu, serta petunjuk teknis pelayanan bersifat ajeg dan bebas dari fluktuasi yang membingungkan. Dampak positifnya, para kader, tenaga medis, beserta masyarakat sasaran dapat berkoordinasi secara harmonis sehingga pelayanan kesehatan primer mampu terealisasi dengan tertib dan sistematis, selaras dengan tesis Edward III mengenai pentingnya arahan yang berkesinambungan.

2. Sumber Daya
   a. Staf

      Pilar fundamental dalam keberhasilan eksekusi suatu kebijakan publik bersandar penuh pada kesiapan sumber daya manusia selaku aparatur pelaksana di lapangan. Berdasarkan postulat teoretis George C. Edward III (1980:11), penambahan kuantitas staf tidak akan bermakna secara fungsional tanpa ditopang oleh aspek kapabilitas, kecakapan teknis, serta keahlian spesifik yang relevan dengan beban tugasnya. Namun, fakta empiris di Desa Banyu Tajun Hilir menunjukkan bahwa indikator ketersediaan staf pada Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) belum beroperasi secara optimal. Kompetensi dan pemahaman teknis para kader ditemukan belum merata, sehingga sebagian dari mereka tetap memerlukan supervisi serta pendampingan intensif saat aktivitas pelayanan berlangsung. Keterbatasan kapasitas operasional kader ini semakin krusial ketika terjadi lonjakan drastis jumlah kunjungan masyarakat, yang berujung pada penurunan kualitas mutu pelayanan kesehatan primer. Anomali lapangan ini jelas bertolak belakang dengan premis Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bertumpu pada kecukupan jumlah dan keandalan kompetensi para agen pelaksana.

   b. Informasi

      Dalam ruang lingkup eksekusi kebijakan publik, ketersediaan informasi memegang peranan vital melalui dua dimensi utama, yakni aspek panduan teknis operasional tindakan serta data kepatuhan hukum para aktor pelaksana. Menukil tesis teoretis George C. Edward III (1980:12), efisiensi eksekusi program sangat bergantung pada pemahaman komprehensif implementor mengenai apa yang harus dilakukan saat perintah diturunkan, sekaligus adanya kepastian bahwa seluruh elemen mematuhi regulasi formal pemerintah. Kendati demikian, fakta empiris pada Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Banyu Tajun Hilir memperlihatkan kondisi yang belum optimal terkait indikator informasi tersebut. Meskipun pihak Puskesmas telah mendiseminasikan mekanisme pelayanan dan pembagian tugas, sejumlah kader terpantau belum menginternalisasi petunjuk teknis secara merata sehingga tetap membutuhkan supervisi serta arahan berkelanjutan. Keterbatasan kognitif ini memicu kendala operasional, sebuah anomali yang kontradiktif dengan postulat Edward III mengenai urgensi penguasaan informasi demi efektivitas kebijakan.

   c. Wewenang

      Legitimasi formal melalui pemberian wewenang yang jelas merupakan pondasi krusial agar setiap instruksi dalam kebijakan publik dapat dieksekusi secara legal. Merujuk pada pemikiran teoretis George C. Edward III (1980:13), otoritas resmi memberikan kekuatan hukum bagi para implementor di mata publik, sehingga tanpa adanya keabsahan ini, proses pembumian kebijakan rentan mengalami penolakan dan kegagalan. Kondisi ideal terkait aspek otoritas ini telah terwujud secara optimal dalam implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Banyu Tajun Hilir. Data lapangan menyingkapkan bahwa para kader telah dibekali dengan batasan wewenang serta pembagian ranah kerja yang definitif. Implikasinya, para eksekutor

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

program dapat mengemban tanggung jawab mereka dengan penuh percaya diri, yang pada akhirnya menstimulasi iklim pelayanan kesehatan primer yang tertib, terarah, dan senantiasa bersandar pada koridor regulasi yang berlaku. Realitas positif ini mengonfirmasi kebenaran tesis Edward III mengenai urgensi kejelasan wewenang dalam memacu kelancaran program.

d. Fasilitas

Legitimasi formal melalui pemberian wewenang yang jelas merupakan pondasi krusial agar setiap instruksi dalam kebijakan publik dapat dieksekusi secara legal. Merujuk pada pemikiran teoretis George C. Edward III (1980:13), otoritas resmi memberikan kekuatan hukum bagi para implementor di mata publik, sehingga tanpa adanya keabsahan ini, proses pembumian kebijakan rentan mengalami penolakan dan kegagalan. Kondisi ideal terkait aspek otoritas ini telah terwujud secara optimal dalam implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Banyu Tajun Hilir. Data lapangan menyingkapkan bahwa para kader telah dibekali dengan batasan wewenang serta pembagian ranah kerja yang definitif. Implikasinya, para eksekutor program dapat mengemban tanggung jawab mereka dengan penuh percaya diri, yang pada akhirnya menstimulasi iklim pelayanan kesehatan primer yang tertib, terarah, dan senantiasa bersandar pada koridor regulasi yang berlaku. Realitas positif ini mengonfirmasi kebenaran tesis Edward III mengenai urgensi kejelasan wewenang dalam memacu kelancaran program.

3. Disposisi

a. Efek Disposisi

Legitimasi formal melalui pemberian wewenang yang jelas merupakan pondasi krusial agar setiap instruksi dalam kebijakan publik dapat dieksekusi secara legal. Merujuk pada pemikiran teoretis George C. Edward III (1980:13), otoritas resmi memberikan kekuatan hukum bagi para implementor di mata publik, sehingga tanpa adanya keabsahan ini, proses pembumian kebijakan rentan mengalami penolakan dan kegagalan. Kondisi ideal terkait aspek otoritas ini telah terwujud secara optimal dalam implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Banyu Tajun Hilir. Data lapangan menyingkapkan bahwa para kader telah dibekali dengan batasan wewenang serta pembagian ranah kerja yang definitif. Implikasinya, para eksekutor program dapat mengemban tanggung jawab mereka dengan penuh percaya diri, yang pada akhirnya menstimulasi iklim pelayanan kesehatan primer yang tertib, terarah, dan senantiasa bersandar pada koridor regulasi yang berlaku. Realitas positif ini mengonfirmasi kebenaran tesis Edward III mengenai urgensi kejelasan wewenang dalam memacu kelancaran program.

b. Melakukan pengaturan birokrasi

Legitimasi formal melalui pemberian wewenang yang jelas merupakan pondasi krusial agar setiap instruksi dalam kebijakan publik dapat dieksekusi secara legal. Merujuk pada pemikiran teoretis George C. Edward III (1980:13), otoritas resmi memberikan kekuatan hukum bagi para implementor di mata publik, sehingga tanpa adanya keabsahan ini, proses pembumian kebijakan rentan mengalami penolakan dan kegagalan. Kondisi ideal terkait aspek otoritas ini telah terwujud secara optimal dalam implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Banyu Tajun Hilir. Data lapangan menyingkapkan bahwa para kader telah dibekali dengan batasan wewenang serta pembagian ranah kerja yang definitif. Implikasinya, para eksekutor program dapat mengemban tanggung jawab mereka dengan penuh percaya diri, yang pada akhirnya menstimulasi iklim pelayanan kesehatan primer yang tertib, terarah, dan senantiasa bersandar pada koridor regulasi yang berlaku. Realitas positif ini

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mengonfirmasi kebenaran tesis Edward III mengenai urgensi kejelasan wewenang dalam memacu kelancaran program.

c. Insentif

insentif merupakan salah satu strategi krusial yang dikemukakan oleh Edward III (1980: 89) untuk mengarahkan kecenderungan para pelaksana kebijakan. Karena individu secara alamiah bertindak demi pemenuhan self-interest atau profitabilitas organisasi, penyesuaian terhadap keuntungan maupun konsekuensi biaya tertentu efektif memicu motivasi mereka dalam menjalankan instruksi secara optimal. Selaras dengan premis tersebut, temuan lapangan melalui observasi dan wawancara mengonfirmasi bahwa alokasi insentif bagi kader Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) telah berjalan sangat efektif. Stimulus finansial atau penghargaan ini terbukti sukses mendongkrak antusiasme, loyalitas, dan keaktifan para kader dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat setempat. Secara teoritis, keberhasilan implementasi ini memperkuat adagium Edward III bahwa intervensi insentif secara tepat mampu memodifikasi perilaku dan komitmen agen pelaksana akibat adanya dorongan imbalan yang mereka dapatkan.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operating Prosedures (SOP)

Standard Operating Procedures (SOP) merupakan instrumen prosedural terencana dan rutin yang dirancang guna memandu aparat birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan harian sesuai standar minimum kelayakan bagi publik (Edward III, 1980: 125). Kendati demikian, potret implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Banyu Tajun Hilir menunjukkan realitas yang kontradiktif. Hasil observasi dan wawancara mengindikasikan bahwa penerapan SOP di wilayah tersebut belum berjalan optimal akibat inkonsistensi di lapangan. Hal ini tercermin dari tidak tertibnya pengisian berkas skrining, nihilnya tindak lanjut kunjungan rumah bagi lansia yang absen, ketergantungan kader pada instruksi tenaga medis, hingga mangkraknya agenda Posyandu Remaja. Kegagalan operasional ini tidak selaras dengan postulat Edward III yang menegaskan bahwa deviasi terhadap SOP secara otomatis mendegradasi mutu dan keberhasilan sebuah kebijakan publik.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan distribusi wewenang serta tanggung jawab operasional ke berbagai unit kerja spesifik berdasarkan kompetensi sektoralnya demi menjamin efektivitas eksekusi kebijakan (Edward III, 1980: 143). Kendati pembagian peran antara Pemerintah Desa, Puskesmas, bidan desa, serta kader di Desa Banyu Tajun Hilir telah terpetakan dengan baik, realitas lapangan menunjukkan bahwa aspek fragmentasi ini belum berjalan optimal. Hambatan fundamental terletak pada lemahnya sinergi dan komunikasi lintas sektor, yang berimbas langsung pada mandeknya pelaksanaan Posyandu Remaja akibat sinkronisasi jadwal yang buruk antara petugas medis dan kelompok sasaran. Fenomena ini jelas berseberangan dengan tesis Edward III yang menekankan bahwa fragmentasi struktur birokrasi hanya akan berhasil memicu keberhasilan program apabila dibarengi dengan mekanisme koordinasi yang solid dan harmonis di antara seluruh agen pelaksana.

B. Faktor-Faktor Yang Implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Di Desa Banyu Tajun Hilir Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung:

a. Tepatnya penerima manfaat pada program posyandu Balita,ibu hamil, dan lansia.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

b. Pelaksanaa program posyandu Balita, Ibu hamil, dan lansia sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan setiap bulannya.

2. Faktor Penghambat:
   a. Keterbatasan anggaran
   b. Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi kader Posyandu ILP
   c. Belum adanya pembaruan alat Kesehatan
   d. Kurangnya penyampaian informasi mengenai Posyandu ILP menyebabkan masyarakat belum memahami tujuan dan pelaksanaan program
   e. Belum dilaksanakannya kunjungan rumah (home visit) kepada sasaran yang tidak hadir, terutama lansia

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif mengenai Implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Banyu Tajun Hilir, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa program esensial ini secara umum belum terealisasi secara maksimal akibat beberapa kendala struktural dan operasional. Ditinjau dari dimensi komunikasi, aspek transmisi informasi dan kejelasan program dinilai belum efektif karena frekuensi diseminasi publik masih sangat rendah serta adanya ketidakpastian jadwal bagi kelompok remaja, meskipun konsistensi pelaksanaan Posyandu bulanan sudah berjalan cukup tertib. Pada aspek sumber daya, keterbatasan kuantitas serta kompetensi teknis para kader mengharuskan adanya pendampingan intensif dari tenaga medis, ditambah dengan belum meratanya pemahaman regulasi operasional serta minimnya fasilitas penunjang akibat terbatasnya alokasi anggaran, walaupun pembagian wewenang fungsional kader sudah terlaksana dengan baik. Dari sudut pandang disposisi, komitmen moral para petugas kesehatan serta efektivitas pemberian insentif terbukti sangat memuaskan dalam memelihara motivasi kerja kader, sekalipun tata laksana birokrasi belum sepenuhnya mengadopsi konsep integrasi layanan yang holistik. Sementara itu, pada pilar struktur birokrasi, kepatuhan terhadap Standard Operating Procedures (SOP) dan aspek fragmentasi masih tergolong lemah, yang ditandai dengan belum berjalannya agenda kunjungan rumah (home visit) bagi sasaran yang absen, pengisian instrumen skrining yang kurang optimal, serta belum terbentuknya Posyandu Remaja akibat buruknya koordinasi lintas sektor dalam menyelaraskan agenda kegiatan. Keberhasilan program ini sejauh ini didukung oleh ketepatan penentuan sasaran kelompok prioritas—meliputi balita, ibu hamil, dan lansia—serta kedisiplinan jadwal pelayanan berkala yang diinstruksikan oleh pihak puskesmas. Sebaliknya, rintangan utama yang menghambat kemajuan program ini meliputi keterbatasan dana operasional yang memicu kelangkaan alat kesehatan modern, rendahnya kesadaran serta partisipasi aktif kelompok lansia untuk memeriksakan diri, dan minimnya pelatihan berkala guna meningkatkan keterampilan para kader di lapangan. Oleh sebab itu, guna mengoptimalkan kinerja Posyandu ILP secara berkelanjutan, direkomendasikan adanya langkah strategis berupa perluasan sosialisasi door-to-door, penguatan dukungan anggaran desa untuk pengadaan inventaris medis, edukasi persuasif bagi lansia, serta pelatihan kompetensi kader secara berkala demi menjamin integrasi pelayanan yang inklusif dan profesional.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, Awan Y. dan Rusfiana, Yudi. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Agustino Leo, Ph.D. 2022. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi ke-2. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2019. Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2. Bandung: ALFABETA,CV.

Anggara, Sahya (2014). Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia

Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).

Anonim, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)

Anonim, 2022. Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Adminitrasi Publik.

Anirwan (2025). Konsep Teori Administrasi Publik dan Implementasi Kebijakan. Yongyakarta. CV. Budi Utama

Daradjat Kartawidjaja, 2023. Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Mutiarin, A. Z. 2016. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.

Daradjat Kartawidjaja, 2018. Kebijakan Publik Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bandung: Alfabeta.

Dian Suluh Kusuma Dewi, (2022) . Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi Cetakan I, Samudra Biru (Anggota IKAPI).

Kesmas-ID.com. (n.d.). Manfaat Posyandu ILP. Diakses dari https://kesmas- id.com/manfaat-posyandu-ilp/

Novita Tresiana & Noverman Duadji (2021). Implementasi Kebijakan Publik; Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi. Yongyakarta: Suluh Media

Rahayu Kusuma Dewi (2016) . Studi Analisi Kebijakan . Bandung; Pustaka Setia.

Rahmawati, Tria, et al. "Implementasi panduan posyandu dalam penatalaksanaan perencanaan Posyandu Ilp di UPTD Puskesmas Cilimus Tahun 2024." Bemas: Jurnal Bermasyarakat 6.2 (2026): 260-265.

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B Cetakan ke-5.Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B Cetakan ke-2Bandung: Alfabeta.

Taufiqurakhman. 2014. Kebijakan Publik. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.

Tuwu, Darmin, and La Tarifu. "Implementasi program posyandu lansia untuk menjaga kesehatan lanjut usia." Journal Publicuho 6.1 (2023): 20-29.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Zakia, Rahma Muthia. "Analisis Implementasi Integrasi Layanan Kesehatan Primer di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis." Evi Susanti Sinaga, SKM, MPH 3525 (2024).